



Wisuda Sekolah Tidak Wajib

JOGJA—Wisuda untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA di DIY, tidak terlalu penting. Di Gunungkidul, orang tua mengeluhkan adanya wisuda siswa.

Triyo Handoko, David Kurniawan
redaksi@harianjogja.com

Meski kegiatan itu diinisiasi Komite Sekolah, beberapa orang tua wali keberatan karena biaya yang dipungut membebani dan bersifat "wajib." Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan menyatakan wisuda tidak bersifat wajib. Bahkan, Disdikpora Kota Jogja sudah mengeluarkan surat edaran ke sekolah-sekolah.

Surat edaran tersebut menegaskan tidak ada kewajiban wisuda bagi lulusan sekolah. Sekolah juga harus memperhatikan aspirasi orang tua yang menolak kegiatan tersebut.

► Disdikpora Kota Jogja sudah mengeluarkan surat edaran ke sekolah-sekolah.

► Ketua Dewan Pendidikan DIY, Sutrisna Wibawa, menilai jika kegiatan wisuda malah memberatkan orang tua maka sebaiknya tidak dilakukan.

"Sudah kami imbau sekolah-sekolah negeri di Jogja agar tidak mewajibkan wisuda. Apabila ada orang tua yang menolak berarti tak usah digelar," kata Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikpora Jogja, Mujino, Jumat (16/6).

Surat Edaran No.422/1841 tersebut ditujukan kepada kepala TK, SD, dan SMP se-Kota Jogja. Pada bagian Kegiatan Akhir Tahun di Surat Edaran itu, tercantum tiga poin.

► Halaman 10

Wisuda Sekolah...

Pertama, acara tutup tahun/perpisahan baik TK, SD maupun SMP pada prinsipnya tidak berkaitan dengan proses pembelajaran, oleh karena itu acara tersebut tidak wajib dilaksanakan oleh sekolah.

Kedua, sekolah atau pihak mana pun dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik untuk pelaksanaan acara tutup tahun/perpisahan.

Ketiga, rasa syukur atas telah selesainya proses pembelajaran bisa diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama guna meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.

Mujino menegaskan apabila hanya ada satu orang tua yang menolak kegiatan wisuda, sekolah wajib mendengarkannya, dan apabila tidak ada titik temu maka wisuda harus ditiadakan. "Selama ini masalahnya justru orang tua yang minta-minta ke sekolah agar diadakan wisuda," ujarnya.

Permintaan, katanya, kerap datang dari para orang tua untuk mengadakan wisuda, jelas Mujino, ditindaklanjuti sekolah dengan tepat. "Selama ini belum ada keluhan soal penyelenggaraan wisuda untuk tingkat SD, kalau SMP seperti itu juga sama," ujar dia.

Proses Seremoni

Ketua Dewan Pendidikan DIY, Sutrisna Wibawa, menilai jika kegiatan wisuda malah memberatkan orang tua, sebaiknya tidak dilakukan. Dewan Pendidikan DIY menyebut wisuda mulanya adalah tradisi di dunia barat untuk merayakan selesainya pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi yang lalu diadopsi oleh perguruan tinggi di Tanah Air.

Mantan Rektor UNY itu mengaku kaget dengan mulai maraknya

kegiatan wisuda yang dilakukan TK, SD, SMP, dan SMA di DIY. "Tetapi kok tiba-tiba TK, SD, sekolah-sekolah itu ikut-ikutan, seperti latak begitu," katanya.

Sutrisna menilai kegiatan wisuda TK, SD, SMP, dan SMA di Jogja tak memiliki urgensi. "Apalagi jika ada yang keberatan karena wisuda tersebut menyebabkan tambahan biaya sekolah, maka sebaiknya dipertimbangkan dengan bijak," ujarnya.

Dalam pendidikan, jelas Sutrisna, wisuda hanyalah proses seremonial dari berhasilnya siswa menempuh pendidikan. "Tidak ada urgensinya wisuda di sekolah, sebenarnya tidak perlu ada. Di perguruan tinggi saja tidak wajib, jadi kalau tidak bisa ikut wisuda ya tetap lulus, tetap dapat ijazah karena cuma seremonial," tegasnya.

Namun, Sutrisna Wibawa mempersilakan sekolah dan orang tua yang ingin merayakan kelulusan anak atau siswanya dengan wisuda. "Kalaupun mau tetap menggelar wisuda, maka bisa dilakukan dengan cara yang seefisien mungkin. Misalnya tidak perlu menyewa gedung, cukup di sekolah masing-masing," ujarnya.

Banyak Keluhan

Keluhan wisuda disampaikan anggota Komisi D DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sugiyanti. Ia mengaku sudah mendapatkan banyak keluhan dari wali murid berkaitan dengan pelaksanaan wisuda sekolah. "Di medsos sudah ada yang mengadu ke Menteri Pendidikan. Ternyata keluhan serupa juga ada di Gunungkidul," kata Ery.

Menurut dia, keluhan disuarakan oleh wali murid karena kegiatan perpisahan tersebut membutuhkan biaya besar. sebagai contoh, untuk wisuda tingkat SMP ada penarikan iuran dari komite sekolah

sebanyak Rp350.000 per anak. "Ada suratnya tentang iuran ini. Malahan ada sekolah yang mengadakan wisuda di hotel dan itu terjadi di Gunungkidul," katanya.

Ery mengatakan wisuda sebaiknya jangan sampai dijadikan tren. Pasalnya, kegiatan yang terlaksana kurang bermanfaat dan lebih menjurus ke huru-hara. "Setahu saya wisuda dulu kalau lulus kuliah, tapi sekarang dilaksanakan mulai dari TK hingga SMA," katanya.

Dia berharap pelaksanaan kegiatan lulusan bisa lebih dikemas sederhana dan tidak mengeluarkan banyak anggaran. Terlebih lagi, sambung Ery, penerimaan peserta didik baru untuk melanjutkan sekolah juga membutuhkan banyak biaya. "Daripada untuk wisuda, mending dipergunakan persiapan untuk melanjutkan sekolah. Ini akan lebih bermanfaat," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati memastikan tidak ada aturan berkaitan dengan wisuda sekolah. Adapun pelaksanaan merupakan kebijakan dari masing-masing sekolah.

"Tidak ada aturannya untuk wisuda sekolah. Sebab, yang masuk agenda hanya pengumuman kelulusan," kata Nunuk.

Meski demikian, ia tidak menampik adanya kegiatan pelepasan terhadap siswa yang lulus. Nunuk mengakui hingga sekarang belum menerima laporan berkaitan dengan keluhan tentang penyelenggaraan pelepasan para siswa.

"Selama mendatangi undangan ke sekolah, belum menemukan acara pelepasan seperti wisuda pada saat kuliah. Hingga sekarang juga belum menerima keluhan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005